



Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan

Journal homepage: <https://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK/>



Determinan Kualitas Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Nur Ika Yuliasuti¹, Hari Purnama²

Fakultas Bianis, Universitas PGRI Yogyakarta, Indonesia

*Correspondence: E-mail: nurikayuliasuti98@gmail.com

ABSTRACT	INFO ARTIKEL
<p>This study aims to determine the effect of competence, independence, and time pressure on the quality of Local Government Financial Statements (LKPD) reviews. This study used a quantitative method which was carried out at the provincial inspectorate, namely the Special Region of Yogyakarta. The population in this study amounted to 109 employees, while the sample as respondents amounted to 40 employees taken using a purposive sampling technique. The data used is primary data collected through direct distribution of questionnaires. The data analysis technique used is multiple linear regression analysis using IBM SPSS. The results of the study show that competence, independence, and time pressure affect the quality of the Local Government Financial Statements (LKPD) reviews.</p>	<p>Article History: <i>Submitted/Received 2 Sept 2023</i> <i>First Revised 22 Sept 2023</i> <i>Accepted 1 Nov 2023</i> <i>First Available online 4 Dec 2023</i> <i>Publication Date 17 Dec 2023</i></p> <hr/> <p>Keyword: <i>Competence; Independence;</i> <i>Review Quality; Time Pressure.</i></p>

1. PENDAHULUAN

Perkembangan jaman yang semakin cepat ini mendorong pemerintah untuk menyelenggarakan pengelolaan negara yang adil, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan tersebut bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintah yang *good governance* (Inspektorat DIY, n.d.). Pemerintah sektor publik dituntut untuk dapat memberikan informasi yang terbuka terhadap pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah dalam menyelenggarakan pengelolaan yang adil, transparan dan akuntabel tersebut salah satu caranya yaitu dengan pengendalian. Pengendalian yang dimaksud yaitu melalui fungsi pengawasan internal yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah atau APIP. Unsur pengawasan terdiri dari inspektorat provinsi dan inspektorat kabupaten/kota.

Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah diwajibkan direviu sebelum diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk diaudit. Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) memiliki kewajiban untuk melakukan reviu Laporan Keuangan (Peraturan Pemerintah, 2006). Pelaksanaan reviu menjadi dasar dibuatnya surat pertanggung jawab menteri/pemimpin lembaga/kepala daerah atas laporan keuangannya. Inspektorat Provinsi ataupun inspektorat kabupaten/kota memiliki peran dan fungsi yang hampir sama untuk melakukan pengawasan di wilayahnya.

Sebagai tindak lanjut atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah dibuatlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman pelaksanaan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Peraturan tersebut menyebutkan reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) (Kementrian Dalam Negeri, n.d.). Pelaksanaan reviu penting dilakukan, hal tersebut menjadikan peran inspektorat dalam pengawasan semakin besar dan memiliki nilai yang strategis untuk mengendalikan kebijakan keuangan daerah.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mengumumkan hasil audit dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester 1 tahun 2020. Hasil audit tersebut menunjukkan dari 541 LKPD sebanyak 483 LKPD memperoleh opini wajar tanpa pengecualian, opini wajar dengan pengecualian atas 49 LKPD, opini tidak menyatakan pendapat atas 4 LKPD, dan opini tidak wajar atas 2 LKPD. Berdasarkan tingkat pemerintah opini wajar tanpa pengecualian dicapai 33 dari 34 pemerintah provinsi, 365 dari 415 pemerintah kabupaten, dan 88 dari 93 pemerintah kota (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2021).

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang seluruh laporan keuangan pemerintah provinsi dan juga laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksaan Keuangan. Opini wajar tanpa pengecualian yang didapat atas laporan keuangan pemerintah provinsi dan juga laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota didapat dari tahun 2016 – tahun 2021. Artinya sampai tahun 2021 telah mendapat 12 kali opini wajar tanpa pengecualian. (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2021). Pertasi yang telah diperoleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta akan menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan trnsparansi pengelolaan keuangan daerah (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2022).

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta meskipun meperoleh hasil pemeriksaan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian Badan Pemeriksaan Keuangan masih menemukan

permasalahan terkait pengelolaan keuangan daerah. Permasalahan yang di temukan oleh Badan Pengawasan Keuangan yaitu, pengelolaan piutang pajak, retibusi, dan piutang lain lain PAD belum memadai, Pengelolaan atas barang milik daerah belum tertib, dan Pelaksanaan belanja modal pada beberapa kontrak tidak sesuai ketentuan (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2022). Selain permasalahan tersebut BPK juga menemukan permasalahan pada LHP Kinerja atas Upaya Penanggulangan Kemiskinan pada Pemda D.I.Yogyakarta dan Iktisar Hasil Pemeriksaan Daerah tahun 2021. Masalah tersebut antara lain penyusunan perencanaan program penanggulangan kemiskinan yang belum sepenuhnya memadai.

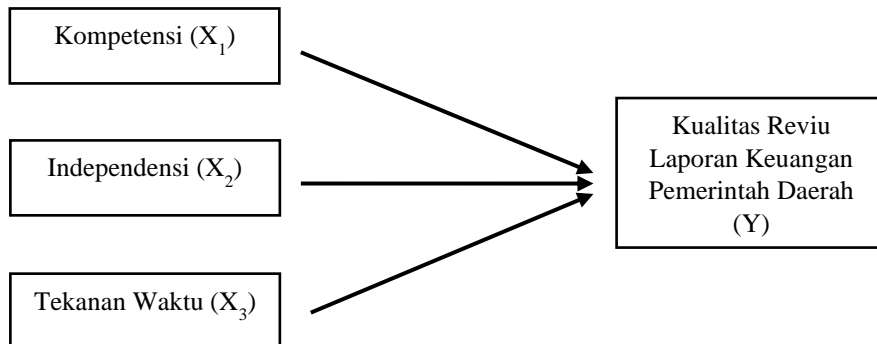
Permasalahan tersebut berdampak pada laporan keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut dapat menggambarkan bahwa masih terdapat laporan keuangan pemerintah daerah yang belum berkualitas baik. Permasalahan tersebut memberikan tantangan untuk inspektorat daerah memperbaiki kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Kualitas LKPD yang salah saji dan masih belum sesuai SAP mencerminkan reuiu yang belum maksimal sebab kualitas LKPD dipengaruhi oleh kualitas reuiu LKPD (Maulana et al., 2017). Belum maksimalnya reuiu laporan keuangan terjadi karena masih kurang maksimal APIP menjalankan tugas melakukan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Penyimpangan maupun salah saji laporan keuangan diharapkan dapat berkurang dengan adanya reuiu. Aparat pengawasan yaitu inspektorat harus mampu mengungkap lebih rinci kesalahan penjayian dalam laporan saat pelaksanaan reuiu atas laporan keuangan (Hadi & Hermanto, 2018).

Reuiu laporan keuangan pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh individu yang mereviunya. Dengan uraian tersebut perlunya mengoptimalkan individu pereuiu serta jangka waktu yang tepat untuk mendapatkan hasil reuiu yang maksimal. Inspektorat selaku APIP perlu memiliki kompetensi yang memadai untuk menjalankan tugasnya salah satunya mereuiu laporan keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan berkualitas memiliki peran penting bagi yang membutuhkan sebab memiliki informasi – informasi (Purnama, 2020). Kompetensi merupakan keahlian/ketrampilan seseorang atau individu dalam bidangnya. Kompetensi sangat diperlukan dalam melaksanakan tugas diberbagai jabatan (Putri & Pratiwi, 2021). Selain kompetensi pereuiu juga sebaiknya perlunya independensi dalam diri pereuiu yang artinya pereuiu dalam melaksanakan reuiu tidak memihak dan atas dasar kepentingan umum, bukan perorangan dan kelompok atau golongan (Ramadhan, 2020).

Kompetensi dan independensi dalam melakukan reuiu laporan keuangan pemerintah daerah sangat penting. Namun, terdapat satu faktor lagi yang juga penting dalam reuiu laporan keuangan pemerintah daerah yaitu tekanan waktu. Adanya tekanan waktu yang diberikan dalam melaksanakan reuiu mampu menguji bagaimana pereuiu bertindak untuk menghasilkan reuiu laporan keuangan pemerintah daerah yang maksimal. Pada penelitian (Isnanniasa & Prasetyono, 2020) menyatakan bahwa tekanan waktu berpengaruh positif terhadap kualitas reuiu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, namun dalam penelitian (Widyarini & Ratnadi, 2016) mengatakan bahwa tekanan waktu berpengaruh negative terhadap kualitas reuiu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Kompetensi dan independensi merupakan atribut yang berasal dari dalam diri pereuiu sedangkan tekanan waktu merupakan karakteristik dari luar pereuiu (lingkungan dan kondisi sekitar) menjadi atribut situasi pereuiu. Oleh karena itu penelitian ini penulis menggunakan teori atribusi sebagai landasan teori yang digunakan.

Berdasarkan peristiwa, permasalahan dan adanya tidak konsisten hasil dari penelitian – penelitian sebelumnya, maka penulis berkeinginan melakukan penelitian mengenai faktor yang

mempengaruhi reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan judul “**Determinan Kualitas Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**”.



Gambar 1.0
Kerangka Berfikir

Pengaruh Kompetensi terhadap Kualitas Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kompetensi menjadi suatu karakteristik yang melekat pada diri seseorang yang dapat menunjang kualitas pekerjaan yang dilakukan. Sejalan dengan Standar Audit Internal Pemerintah Indonesia (SAIPI) maka seorang auditor wajib memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan serta kompetensi lain dalam melakukan pemeriksaan (Isnanniasa & Prasetyono, 2020). Kompetensi merupakan suatu karakteristik diri seseorang seperti pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*) dan kemampuan (*abilty*) dalam melakukan suatu pekerjaan (Havesi, 2005). Kompetensi pereviu sangatlah penting untuk menghasilkan reviu laporan keuangan yang maksimal

H1: Kompetensi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengaruh Independensi terhadap Kualitas Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Independensi dipandang sebagai karakteristik sikap yang barasal dari dalam diri individu, sehingga independensi menjadi salah satu atribut personal pereviu yang mampu mempengaruhi tindakan dan perilaku yang dilakukan selama proses reviu berlangsung. Independensi menjadi suatu sikap yang harus dijunjung tinggi dan dipertahankan oleh auditor baik ketika melakukan audit ataupun reviu laporan keuangan (Setyaningrum & Kuntadi, 2019).

H2: Independensi berpengaruh terhadap kualitas reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengaruh Tekanan Waktu terhadap Kualitas Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Tuntutan ketepatan waktu bagi auditor dalam melaksanakan tugas menyebabkan auditor tidak jarang mengabaikan perencanaan dan prosedur audit yang seharusnya, sehingga pada akhirnya menimpulkan pengambilan keputusan yang salah (Pratomo, 2016).

H3: Tekanan Waktu berpengaruh terhadap kualitas reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang berada di Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta. Sampel penelitian menggunakan teknik purposive sampling. Syarat dan ketentuan yaitu pegawai dengan jabatan sebagai fungsional Auditor (JFA) atau terlibat dalam pelaksanaan reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan dengan pendekatan kuantitatif. Sumber data penelitian adalah data primer yang artinya diperoleh dari jawaban responden yang didapat dari penyebaran kuesioner.

Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa kuesioner (angket). Penyebaran kuesioner dalam penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden. Hasil kuesioner diukur menggunakan skala *likert* 5 poin yaitu: (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Ragu – ragu, (4) Setuju, (5) Sangat Setuju.

Definisi dan Pengukuran Variabel

Kompetensi akuntansi merupakan keahlian, pengetahuan, dan keterampilan terkait akuntansi yang dimiliki seorang pereviu dalam melaksanakan reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Isnanniasa & Prasetyono, 2020). Variabel ini diukur dengan menggunakan pernyataan berskala *likert* 5 poin. Variabel kompetensi akuntansi diukur dengan indikator hasil modifikasi dari PMK No:8/PMK09/2015 dan (Amirullah et al., 2010), yaitu: Pemahaman mengenai SAP, Pemahaman mengenai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD), Pemahaman terkait kegiatan pokok entitas yang direviu, Penguasaan terkait dasar – dasar audit, Pendidikan pereviu, dan Pengalaman pereviu.

Independensi merupakan sikap tidak memihak kepentingan siapapun. Variabel ini diukur dengan menggunakan pernyataan berskala *likert* 5 poin. Indikator untuk mengukur variable independensi dikembangkan dari penelitian (Subur, 2019), yaitu Hubungan dengan klien, Independensi pelaksanaan pekerjaan, dan Independensi Laporan

Tekanan waktu merupakan kondisi dimana pereviu mendapatkan tekanan karena adanya kompleksitas tugas yang tidak sebanding dengan anggaran waktu reviu. Waktu reviu yang diberikan tidak cukup untuk menyelesaikan reviu sesuai dengan anggaran waktu yang diberikan (Isnanniasa & Prasetyono, 2020). Variabel ini diukur dengan menggunakan pernyataan berskala *likert* 5 poin. Pengukuran tekanan waktu dalam penelitian dikembangkan dari (Isnanniasa & Prasetyono, 2020 dan Widyarini & Ratnadi, 2016) yang meliputi: Keterbatasan waktu penugasan, Penyelesaian reviu dengan waktu yang ditentukan, Pemenuhan target waktu selama penugasan, Fokus tugas reviu dengan keterbatasan waktu, Pengomunikasian anggaran waktu, Efisiensi dalam proses reviu, dan Penilaian kinerja dari atasan.

Kualitas Reviu

Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian laporan keuangan daerah untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan sesuai Standar Akuntansi (SA) dan

laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Variabel ini diukur dengan menggunakan pernyataan berskala *likert* 5 poin. Indikator penilaian reviu dikembangkan dari penelitian (Widyarini & Ratnadi, 2016) sebagai modifikasi dari PMK No:8/PMK.09.2015, yang meliputi: Waktu pelaksanaan reviu, Kompetensi yang dimiliki pereviu, Prosedur/tahapan dalam pelaksanaan reviu, Kertas kerja reviu, dan Laporan reviu.

Teknik Analisis Data

Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data dengan melihat nilai rata-rata (*mean*), maksimum, dan minimum (Ghozali, 2018).

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid ketika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Suatu kuesioner dinyatakan valid atau layak digunakan apabila r hitung $>$ r tabel. Selain itu, kuesioner dikatakan valid atau tidak dapat dilihat dari hasil signifikansi yang menunjukkan korelasi dari masing-masing skor total P Value $< 0,05$ atau 5% (Ghozali, 2018).

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan alat yang digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Pertanyaan pada kuesioner dikatakan reliabel apabila nilai *Cronbach's Alpha* $>$ r tabel. Sebaliknya, pertanyaan dikatakan tidak reliabel apabila nilai *Cronbach's Alpha* $<$ r tabel. Reliabel atau tidaknya kuesioner dilihat dari nilai *Cronbach's Alpha* $>$ 0,70 artinya dapat dikatakan reliabel. Uji reliabilitas pada kuesioner menggunakan uji statistik *Cronbach Alpha* (α) (Ghozali, 2018).

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh kompetensi, independensi, dan tekanan waktu terhadap kualitas reviu laporan keuangan pemerintah daerah. Rumus regresi linear berganda yang digunakan adalah:

$$Y = \beta_0 + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y = kualitas reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

β_0 = intersep

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = koefisien regresi

X1 = kompetensi

X2 = independensi

X3 = tekanan waktu

e = error

Uji Hipotesis

Uji t

Uji statistik t digunakan untuk menyatakan seberapa pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2018). Apabila nilai signifikansi menunjukkan angka $<0,05$ artinya terdapat pengaruh signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen. Sebaliknya, apabila nilai signifikansi menunjukkan pada angka $>0,05$ artinya tidak terdapat pengaruh signifikansi antara variabel independen terhadap dependen.

Uji F

Uji statistik F digunakan untuk mengetahui semua variabel independen memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Apabila nilai signifikansi $<0,05$ artinya variabel independen secara bersama-sama terdapat pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018).

Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan atau pengaruh yang diberikan oleh variabel dependen dalam menjelaskan variabel independen. Nilai koefisien determinasi yaitu antara nol dan satu. Apabila nilai R^2 menghasilkan nilai yang kecil artinya kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Namun, nilai R^2 yang mendekati satu artinya variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan dalam memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2018).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Statistik Deskriptif

Pengujian statistic deskriptif menunjukkan bahwa total sampel dalam penelitian ini berjumlah 40 responden dengan jawaban minimal 1, maksimal 5, rata – rata variabel kompetensi 4,238, variabel independensi 4,260, variabel tekanan waktu 3,971, dan kualitas reuiu LKPD 4,151.

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min.	Max.	Mean
Kompetensi	40	3	5	4,238
Independensi	40	3	5	4,260
Tekanan Waktu	40	1	5	3,971
Kualitas Reuiu LKPD	40	2	5	4,151

Sumber: Data Primer yang diolah, 2023

Uji Validitas

Tabel 2. Hasil Uji Validitas

Variabel	r Hitung	r Tabel	Keterangan
Kompetensi	0,690 – 0,867	0,312	Valid
Independensi	0,730 – 0,813	0,312	Valid
Tekanan Waktu	0,465 – 0,824	0,312	Valid
Kualitas Reviu LKPD	0,425 – 0,868	0,312	Valid

Sumber: Data Primer yang diolah, 2023

Pengujian validitas menggunakan bantuan program software SPSS untuk menguji semua variabel. Hasil uji validitas dari semua variabel menunjukkan bahwa r hitung > 0,312 maka semua item pernyataan dalam variabel ini dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Kriteria	Keterangan
Kompetensi	0,864	Nilai Cronbach's Alpha > 0,70	Reliabel
Independensi	0,807		Reliabel
Tekanan Waktu	0,796		Reliabel
Kualitas reviu LKPD	0,912		Reliabel

Sumber: Data Primer yang dioleh, 2023

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai Cronbach's Alpha dari masing – masing variabel bernilai lebih dari 0,70 artinya semua pernyataan dalam kuesioner dapat dipercaya dan dinyatakan reliable telah memenuhi syarat minimal yang ditentukan dalam penelitian ini.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Ustandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-1,038	4,060			
Kompetensi	0,560	0,213	0,304	2,631	0,012
Independensi	0,707	0,235	0,323	3,009	0,005
Tekanan Waktu	0,548	0,113	0,440	4,847	0,000
Adjusted R Square	0,773				
F hitung	45,219				

Sig. F	0,000
Signifikansi	5%

Sumber: Data Primer diolah, 2023

Berdasarkan hasil pengujian analisis regresi linear berganda dapat dituliskan persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = -1,038 + 0,560 X_1 + 0,707 X_2 + 0,548 X_3 + e$$

Uji t

Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel kompetensi sebesar 0,012, variabel independensi sebesar 0,005, dan variabel tekanan waktu sebesar 0,000. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel kompetensi, independensi, dan tekanan waktu berpengaruh terhadap variabel Y karena memiliki nilai signifikansi < 0,05.

Uji F

Nilai F 45,219 sig 0,000 menunjukkan bahwa semua variabel secara bersamaan berpengaruh terhadap kualitas rewiu laporan keuangan pemerintah daerah karena tingkat signifikansi , 0,05.

Analisis Koefisien Determinasi

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,889*	0,790	0,773	1,756

Sumber: Data Primer diolah, 2023

Hasil pengujian menunjukkan nilai Adjusted R Square sebesar 0,773 atau 77,3% berarti variabel Y dapat dijelaskan atau dipengaruhi oleh kompetensi, independensi, dan tekanan waktu.

Pengaruh Kompetensi Terhadap Kualitas Rewiu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Hasil analisis diperoleh t hitung sebesar 2,631 > t table sebesar 2,026 dan nilai signifikan 0,012 < 0,05. Hal tersebut menjelaskan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap kualitas rewiu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Isnanniasa & Prasetyono, (2020) serta Hadi & Hermanto, (2018) yang menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap kualitas rewiu laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kompetensi pereviu maka akan semakin baik pula kualitas rewiu yang dihasilkan. Suatu rewiu dapat dikatakan berkualitas jika seseorang pereviu memiliki kompetensi baik dari segi mutu personal maupun keahlian khusus (Sucipto & Ahmar, 2017).

Pengaruh Independensi terhadap Kualitas Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Hasil analisis diperoleh t hitung sebesar 3,009 > t table sebesar 2,026 dan nilai signifikan 0,005 < 0,05. Hal tersebut menjelaskan bahwa independensi berpengaruh terhadap kualitas reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Subur, (2019) serta Isnanniasa & Prasetyono, (2020) yang menyatakan bahwa independensi berpengaruh terhadap kualitas reviu laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin independensi pereviu maka akan semakin baik kualitas reviu yang dihasilkan. Independensi pereviu merupakan suatu sikap dan tindakan dalam melaksanakan pemeriksaan untuk tidak memihak siapapun dan tidak dipengaruhi siapapun. (*Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*, 2017). Pemeriksaan dalam proses reviu harus objektif dan bebas dari benturan kepentingan, independensi dalam pemikiran, independensi dalam penampilan (Riyunti et al., 2019).

Pengaruh Tekanan Waktu terhadap Kualitas Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Hasil analisis diperoleh t hitung sebesar 4,847 > t table sebesar 2,026 dan nilai signifikan 0,000 < 0,05. Hal tersebut menjelaskan bahwa tekanan waktu berpengaruh terhadap kualitas reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Isnanniasa & Prasetyono, (2020) serta Subur, (2019) yang menyatakan bahwa tekanan waktu berpengaruh terhadap kualitas reviu laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin diberikan tekanan waktu pereviu maka semakin baik kualitas reviu yang dihasilkan. Tekanan waktu dalam proses pelaksanaan reviu merupakan hal yang biasa bagi seorang pereviu. Seorang pereviu akan melakukan respon fungsional jika menghadapi tekanan waktu yaitu pereviu akan bekerja lebih baik dan memanfaatkan waktu sebaik – baiknya (Deda et al., 2017).

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan, terdapat analisis yang dapat disimpulkan yaitu hasil penelitian menunjukkan variabel kompetensi, independensi, dan tekanan waktu berpengaruh terhadap kualitas reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya terdapat beberapa responden yang tidak menerima kuesioner dikarenakan responden sudah tidak aktif walaupun masih terdaftar di sistem website dari Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta, metode pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner langsung kepada terdapat beberapa responden yang melakukan pengisian kuesioner memerlukan waktu yang cukup lama sebab adanya kesibukan di Inspektorat Daerah, dan hasil koefisien determinasi atau nilai *Adjusted R Square* dalam penelitian ini adalah 0,773 atau 77,3%, hal ini menunjukkan bahwa terdapat variabel lain sebesar 0,227 atau 22,7% yang tidak digunakan dalam penelitian ini mempunyai pengaruh terhadap kualitas reviu laporan keuangan.

Penelitian selanjutnya sebaiknya bisa melakukan survei langsung dengan melakukan wawancara terlebih dahulu atau melakukan permintaan data langsung kepada Inspektorat Daerah, menggunakan 2 metode dalam teknik pengumpulan data yaitu mendatangi langsung responden dan menggunakan google formulir, dan menambahkan variabel independen lain yang berkaitan dengan kualitas reviu laporan keuangan, seperti saran dari (Subur, 2019) yang

menyarankan variabel seperti sertifikat jabatan fungsional auditor, skeptisisme, motivasi kerja dan kompleksitas tugas.

Hasil penelitian ini memberikan implikasi kepada inspektorat daerah khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta terkait peningkatan kualitas reviu laporan keuangan pemerintah daerah. Tercapainya kualitas reviu laporan keuangan pemerintah daerah dapat dipengaruhi oleh kompetensi dan independensi pereviu serta tekanan waktu yang diberikan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi inspektorat untuk meningkatkan kualitas reviu laporan keuangan pemerintah daerah yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Amirullah, Darwanis, & Rizal Yahya, M. (2010). *The influence of auditor's competence and organizational comitment to the implementation of financial statement review in Aceh inspectorate*. 3(2), 130–154.
- Badan Pemerika Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Opini WTP laporan keuangan PEMDA alami peningkatan*. Siaran Pers BPK RI.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. (2021). *Hasil pemeriksaan LKPD*. BPK RI Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. (2022). *Laporan keuangan pemerintah daerah daerah istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2021 mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian*. BPK RI Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Deda, A., Karamoy, H., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh prosedur reviu, kompetensi, dan jangka waktu pelaksanaan terhadap kualiatas reviu laporan keuangan pemerintah daerah pada inspektorat seprovinsi Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(1), 222–232. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15426>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25*. Badan Terbit Universitas Diponegoro.
- Hadi, A., & Hermanto. (2018). Determinan kualitas reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah dan implikasinya terhadap akuntabilitas keuangan. *Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 1–10.
- Havesi, A. G. (2005). *Standards for internal control in New York State Government*. December, 1–30. <https://www.osc.state.ny.us/>
- Inspektorat DIY. (n.d.). *Tugas, fungsi, dan peran APIP sesuai Permendagri*.
- Isnanniasa, N. S., & Prasetyono. (2020). Determinan kualitas reviu laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(3), 519–530.
- Kementerian Dalam Negeri. (n.d.). *Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) pedoman pelaksanaan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah*.
- Maulana, A., Djamhuri, A., & Purwanti, L. (2017). Determinan kualitas reviu dan implikasinya terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Economia*, 13(2), 118. <https://doi.org/10.21831/economia.v13i2.14980>
- Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang standar pemeriksaan keuangan negara*. (2017). Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah. (2006). *Peraturan Pemerintah (PP) tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah*.
- Pratomo, D. (2016). Pengaruh kompetensi, kompleksitas tugas, dan tekanan anggaran waktu

- terhadap kualitas audit internal pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 16(2), 123–133. www.jab.fe.uns.ac.id
- Purnama, H. (2020). Pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi, standar akuntansi keuangan dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan wajib pajak badan. *Akmenika: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 17(2), 403–417. <https://doi.org/10.31316/akmenika.v17i2.1036>
- Putri, A. Z., & Pratiwi, F. D. (2021). Faktor - faktor yang mempengaruhi pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Akmenika*, 18(2). <https://doi.org/10.31316/akmenika.v18i2.2141>
- Ramadhan, M. A. (2020). Pengaruh kompetensi dan independensi auditor terhadap kualitas audit: studi kasus kantor akuntan publik di Kota Makassar. *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo*, 5(1), 65–84. <https://doi.org/10.35906/ja001.v5i1.531>
- Riyunti, L., Ichi, & Eka Putri, T. (2019). The effect of perception of independence, integrity, and competency of the quality of reviu results with professional skepticism as intervening variables in the subspectorate region of Subang District Subang. *JPSAM (Journal of Public Sector Accounting and Management)*, 1(1), 11–36. <https://ojs.stiesa.ac.id/index.php/jpsam>
- Setyaningrum, D., & Kuntadi, C. (2019). Pengaruh kompetensi, independensi, pekerjaan audit dan komunikasi terhadap efektivitas audit internal. *Journal of Economics, Business & Accountancy Ventura*, 22(1), 39–47. <https://doi.org/10.14414/jebav.v22i1.879>
- Subur, S. (2019). Etika profesional, independensi dan tekanan waktu terhadap kualitas reviu kaporan keuangan (studi kasus pemerintah daerah Kabupaten Pinrang). *Economos : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.31850/economos.v2i1.468>
- Sucipto, T. A., & Ahmar, N. (2017). Independensi , kompetensi , pengalaman , gender dan kualitas hasil reviu auditor Badan Pemeriksa Keuangan di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan JRAP*, 4(2), 171–182.
- Widyarini, K., & Ratnadi, N. M. D. (2016). Pengaruh prosedur, pendidikan, tekanan waktu, dan anggaran reviu pada kualitas reviu laporan keuangan pemerintah daerah. 3(2337–3067), 455–488.